

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Untuk memperkuat tuntutan tersebut, instansi pemerintah perlu memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Organisasi sektor publik sering dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik yang menangani masalah kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah sebagai lembaga publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Rahman & Permatasari, 2021). Sehingga dari publikasi laporan keuangan tersebut dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang digunakan oleh entitas terkhusus pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik). Dari perspektif rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zubaidi et al., 2019). Standar tersebut

dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Nugraheni (2008) melihat bahwa penerapan SAP tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2012) menunjukkan bahwa hasil penelitian penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sako (2018), dan (Hendri & NR, 2020) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Berbeda dengan Fikri (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Sudah menjadi permasalahan umum di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan yaitu dilakukan oleh Wati dan Pratiwi. Spencer (1993) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah (2016) dalam penelitian tersebut variabel sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi keuangan. Temuan ini juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh

Safiyulloah (2017), Andrianto (2017), dan Zubaidi et al., (2019) yang menerangkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Setiap sumber daya manusia juga harus menguasai teknologi informasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Penerapan teknologi informasi pada setiap entitas baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan tentunya mempunyai tujuan yang berbeda karena penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi yaitu untuk mendukung kepentingan usahanya. Teknologi informasi diartikan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan juga merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Taviana & Riharjo, 2020). Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, penerapan teknologi informasi ini memiliki tujuan yang berbeda untuk setiap entitas baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan.

Dalam dunia modern saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Dimana teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia dalam mengelola keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia dibidang akuntansi tapi memanfaatkan teknologi bisa meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Suatu informasi diperoleh dari proses pengolahan data yang dihasilkan dengan bantuan komputer pasti akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi maka akan lebih meningkatkan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah diharuskan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah

sesuai dengan PP No. 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardiansyah (2016), Safiyulloah (2017), dan Andrianto (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Zubaidi et al., (2019) yang menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan hubungan yang positif signifikan. ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten, menguasai teknologi informasi, dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang kuat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, dan (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah (Hardyansyah, 2016). Dalam meneliti kewajaran laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan pengendalian internal sebagai salah satu kriteria.

Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian *intern* (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI perwakilan Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan atas LKPD tahun 2020 dengan kriteria pemeriksaan yaitu kesesuaian penyusunan LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Predikat WTP ke-enam kalinya diraih, setelah sebelumnya lima tahun berturut-turut mendapatkan predikat serupa (bogorkab.go.id).

Laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 buruk dan bisa berdampak terhadap kesimpulan disclaimer. Salah satu penyebabnya adalah auditor BPK menemukan penyimpangan dalam proyek perbaikan jalan Kandang Roda-Pakansari yang masuk dalam program Cibinong *City A Beautiful*. Opini WTP itu dinilai hanya sekadar pencitraan bagi kepala daerah di hadapan masyarakat. Aksi suap Ade beserta anak buahnya terhadap 4 auditor BPK itu diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ade diduga menyuap para auditor itu sebesar Rp 1,9 miliar demi mendapatkan predikat opini WTP dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 (kompas.com). Suap diberikan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 milik Pemkab Bogor.

Pada saat status pimpinan pemerintah Kabupaten Bogor dijabat oleh Bupati Bogor Ade Yasin, terjadi kekosongan jabatan yang disebabkan oleh adanya mutasi pegawai dan purna tugas. Pelantikan dan pengukuhan ini, dilakukan untuk

mengisi kekosongan jabatan, evaluasi kinerja dan juga sebagai kelanjutan dari upaya penyederhanaan birokrasi sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Kepala perangkat daerah diminta untuk fokus mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dan Program Pancakarsa, lebih produktif, bersinergi dan berkolaborasi, serta terus meningkatkan inovasi mengingat kita berada di tahun ke 4, menjelang akhir periode RPJMD 2018-2023, dan untuk memaksimalkan seluruh potensi dan tingkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan dukungan anggaran dan lebih responsif terhadap berbagai perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Kondisi terjadinya kekosongan jabatan di Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan merupakan rasa ketidakmampuan seorang individu dalam memperkirakan dan memutuskan sesuatu hal secara akurat. Ketidakpastian lingkungan disebabkan adanya pengaruh dari pihak internal maupun pihak eksternal organisasi, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, kondisi ekonomi dan politik, terjadinya mutasi karyawan yang cepat dan tindakan demonstrasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Lubis (2017), organisasi merubah proses dan struktur yang ada pada organisasi sebagai bentuk respon terhadap ketidakpastian lingkungan (Rahmasari, 2020). Hasil penelitian Rahmasari (2020) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan beragamnya hasil penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika kompetensi sumber daya manusia meningkat maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Hendri & NR (2020) membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel bebas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) dan Hendri & NR (2020). Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardyansyah (2016) dengan judul penelitian Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (studi empiris pada SKPD kabupaten Polewali Mandar). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hardyansyah (2016) terletak pada penambahan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, perbedaan variabel moderasi yaitu ketidakpastian lingkungan, dan letak lokasi penelitian. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hendri & NR (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu ketidakpastian lingkungan, perbedaan variabel X2, dan perbedaan lokasi penelitian.

Topik penelitian ini penting dikaji pada OPD Kabupaten Bogor. Hal ini karena kualitas laporan keuangan di masing-masing OPD dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Selain itu belum ada yang meneliti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah di OPD Kabupaten Bogor. Berdasarkan kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian lingkungan, penulis tertarik untuk menggunakan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi, dengan tujuan untuk melihat peran ketidakpastian lingkungan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui keterkaitan antar variabel yang diteliti dengan

mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah ketidakpastian lingkungan dapat memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. **Bagi Penulis**

Untuk menambah pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah didalam dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. **Bagi Objek Penelitian**

Memberikan masukan bagi instansi daerah agar dapat lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah mereka melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah yang optimal serta melihat peran ketidakpastian lingkungan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. **Bagi Universitas**

Memberikan masukan bagi dunia akademisi (khususnya dalam bidang pendidikan akuntansi) dalam mendidik dan mendiskusikan mengenai

pentingnya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan penerapan standar akuntansi pemerintah (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dengan ketidakpastian lingkungan (Z) sebagai variabel moderasi.

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini diantaranya adalah pegawai yang minimal masa bekerjanya 1 tahun, pegawai yang pendidikan terakhirnya minimal D3, pegawai yang berkompeten dalam bidangnya, serta pegawai yang mampu menyusun laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan pembahasan terdiri dari lima bab utama meliputi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta simpulan, keterbatasan penelitian, implikasi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Secara rinci penelitian ini memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan, dan ketidakpastian lingkungan, serta teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di gunakan dalam penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial